

## **ABSTRAK**

Tesis ini meneliti penyusunan Perencanaan Strategik 2006-2010 pada BPKP. Penelitian mengungkapkan karakteristik kepublikan yang dimiliki oleh BPKP sebagai organisasi publik dan teknik-teknik yang telah diterapkan oleh BPKP dalam mengatasi kendala akibat adanya karakteristik kepublikannya melalui kuesioner, wawancara dan observasi.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa tingkat kepublikan BPKP adalah 71,43% karena BPKP mempunyai 5 (dari 7) karakteristik kepublikan yang diteliti. Karakteristik kepublikan BPKP meliputi: 1) pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan BPKP tergantung kepada jumlah anggaran yang disetujui oleh pemerintah dan DPR, 2) BPKP mempunyai stakeholders yang beragam, 3) ada keterbatasan kewenangan yang mengakibatkan BPKP tidak dapat melaksanakan jasanya sesuai kebutuhan seluruh pasar, seluruh pelanggan/audit dan seluruh stakeholders, 4) hubungan imbalan dan kinerja pada BPKP tidak jelas dan lemah dan "rewards and punishment" belum berjalan, 5) pegawai BPKP cenderung menolak perubahan. Karakteristik kepublikan yang tidak dimiliki oleh BPKP meliputi : 1) tingkat persaingan yang dialami BPKP tidak sekuat persaingan pada sektor swasta dan 2) dalam penyusunan Perencanaan Strategik 2006-2010 BPKP tidak memperhatikan kebutuhan pelanggan/audit.

Mutu kepublikan Perencanaan Strategik BPKP 2006-2010 adalah 55% karena adanya kelemahan penerapan 5 teknik (dari 13 teknik) untuk mengatasi kendala akibat adanya karakteristik kepublikan.

Penelitian ini penting karena penyusunan Perencanaan Strategik pada instansi pemerintah di Indonesia telah diwajibkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Inpres No. 7 Tahun 1999. Penyusunan Perencanaan Strategik pada instansi pemerintah menimbulkan kesulitan tersendiri karena adanya karakteristik kepublikan organisasi publik yang membedakannya dengan sektor swasta. Perhatian atas karakteristik kepublikan dan teknik yang tepat untuk mengatasi kendala akibat adanya karakteristik kepublikan tersebut menentukan mutu kepublikan suatu Perencanaan Strategik organisasi publik.

## **ABSTRACT**

This research explores Strategic Planning in BPKP. This research seeks to uncover degree of publicness of BPKP, as public organization, and techniques applied by BPKP to overcome difficulties when making strategic planning through questionnaires, interviews, dan observation.

This research concludes that BPKP degree of publicness is 71,43% because BPKP has 5 (of 7) characteristics of publicness observed. BPKP has five publicness characteristics: 1) fund for programs and activities is depend on government and DPR, 2) BPKP has multiple stakeholders, 3) BPKP has the limited authority so that cannot make services that whole market, costumers/auditees, and all stakeholders need , 4) Relation of rewards and performance is weak, 5) the employees of BPKP are difficult to receive change. BPKP do not has two publicness characterisitics : 1) degree of competition where BPKP exists is not as strong as public sector competition, and 2) In designing Strategic Planning 2006-2010, BPKP is not care to costumers/auditees. The publicness grade of BPKP Strategic Planning 2006-2010 is 55% because there are 5 weakness (of 13) in implementing techniques to overcome difficulties cause of its characteristics of publicness.

The research is important because making of strategic planning in governmental institution is a duty as regulated by Instruction of President of Indonesia No. 7, 1999 year. Designing of strategic planning in governmental institution makes difficulties because there are some characteristics of publicness that distinguish public and private organization. Interest on its characteristics of publicness and good techniques to overcome difficulties cause of its characteristics of publicness make contribution to publicness grade of a public organization strategic planning.

